

PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Pati
Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.PTI)
Oleh : Rizki Candra Yulianto
NIM : E1A112071

ABSTRAK

Perkawinan dikatakan sah jika telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multiagama mendukung adanya pasangan yang berbeda agama. Seperti yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.Pti.

Permasalahannya adalah Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama. Metode penelitian : yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data studi kepustakaan, analisis data normatif kualitatif.

Hasil penelitian atas pertimbangan hukum hakim Pasal 34 huruf (a) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 kurang tepat, sebaiknya hakim mendasarkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 69 ayat (1) dan (2) PerPres. No. 25 Tahun 2008 hanya memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Kata Kunci : Penetapan Perkawinan Beda Agama.

RELIGIOUS DIFFERENT MARRIAGE
(Juridical Review Against Determination of Pati
District Court Number 85 / Pdt.P / 2014 / PN.PTI)

By: Rizki Candra Yulianto

NIM: E1A112071

ABSTRACT

Marriage is said to be valid if it has fulfilled the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law, that the marriage is legal if done according to the law of each religion and its belief. The Indonesian nation is a multi-religious nation supporting the existence of different religions. As happened in Stipulation of Pati District Court Number 85 / Pdt.P / 2014 / PN.Pti.

The problem is how the judge's judgment in giving permission to recording different religious marriages. Research methods: normative juridical, analytical prescriptive research specifications, primary, secondary and tertiary legal material sources, library research data collection, normative qualitative data analysis.

The results of the research on judicial consideration of Article 34 letter (a) and Article 35 letter (a) of Law no. 23 of 2006 is less precise, the judge should be based on the Act no. 24 Year 2013 Amendment to Law no. 23 of 2006 on Population Administration. Article 69 paragraph (1) and (2) of the Per- dres. No. 25 of 2008 only fulfills Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law.

Keywords: Determination of Marriage Different Religion.